

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap transparansi laporan keuangan, selain itu juga mencoba memahami dampak penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdampak positif terhadap transparansi laporan keuangan yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka semakin akurat laporan keuangan yang disusun berdasarkan *System Application and Processing (SAP)* yang akan berdampak pada peningkatan kualitas transparansi pelaporan keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdampak positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan yang diterima. Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem akuntabilitas laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan semakin baik pula dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat yang disusun oleh *System Application and Processing*, sehingga meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdampak positif terhadap transparansi

dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Akuntansi Keuangan yang akurat berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah, sehingga mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Mengacu pada kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran, antara lain:

1. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kinerja pegawai harus ditingkatkan, dan penggunaan sumber daya manusia harus lebih kompetitif, karena semua keputusan yang akan diambil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Sebaiknya data lebih mudah diakses bagi orang-orang yang membutuhkan, dan memperkuat pengelolaan website agar semua data laporan keuangan bisa masuk ke website.
3. Dalam proses penerapan transparansi dan akuntabilitas, penggunaan media penerbitan harus ditingkatkan. Sarana yang digunakan pada masa ini masih langka dan terbatas pada sarana tertentu, yang tentunya masih dinilai sangat kurang dalam memberikan informasi yang jelas dan *up-to-date*. Informasi yang diberikan harus mencakup seluruh kegiatan. Mulai dari penyajian hingga laporan keuangan, dipublikasikan di media cetak seperti

surat kabar minimal setahun sekali, dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan.

Oleh karena itu, yang dapat diberikan kepada instansi untuk mengubah Sistem Akuntansi menjadi lebih baik dari sebelumnya, ini dapat membantu bagian *Financial & Accounting* dan bendahara penerimaan lebih meningkatkan kinerja berdasarkan tugas yang tercantum. Selain itu juga dapat mempersingkat waktu pemeriksaan tim pengawas intern, karena jika hasil akhir laporan keuangan berbeda maka bagian *Financial & Accounting* dan bendahara penerimaan akan memerlukan pemeriksaan ulang dalam tim pengawas laporan keuangan, pembuatan proses verifikasi laporan keuangan setiap bulan. Setelah perekaman komputer, akan lebih baik jika bagian *Financial & Accounting* dan bagian bendahara penerimaan memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas.

Karena jelas dari hasil penelitian sering terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan perbedaan laporan keuangan keduanya. Hal ini disebabkan adanya rangkap tugas dan masih belum adanya pemisah wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan efektif, yang akan mempersulit kinerja salah satu pihak. Untuk mempercepat kinerja kedua belah pihak, diharapkan organisasi dapat melakukan pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang dianggap tidak sah atau memang ada tugas rangkap antara salah satu bagian. Pemerintah dapat mempertimbangkan kembali untuk mengurangi, mengalokasikan, atau meningkatkan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). *Laporan Keuangan Daerah* . Retrieved from Kualitas Laporan Keuangan: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/08/kualitas-laporan-keuangan/>
- Baridwan. (2010:4). *Definisi Sistem Akuntansi Menurut Ahli*. Retrieved from Kumpulan Pengertian: <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/03/pengertian-sistem-akuntansi-menurut.html>
- Baswir, R. (2000:7). *Definisi Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved from PERPUSTAKAAN: <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=487>
- Dwiyanto, A. (2006:80). *Definisi Transparansi Menurut Para Ahli*. Retrieved from Redaksi Berita Transparansi: <https://beritatransparansi.co.id/transparansi-menurut-para-ahli/>
- Gade, M. (2000:95). *Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan* . Retrieved from BPKAD.banjarkab.go.id: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/>
- Halim, A. (2002:143). *Definisi Akuntansi Pemerintahan Menurut Ahli*. Retrieved from PERPUSTAKAAN: <https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=487>

Mahmudi. (2010:23). *Pengertian Akuntabilitas Menurut Ahli*. Retrieved from seputar pengetahuan: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html>

Mardiasmo. (2006:3). *Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli*. Retrieved from seputar pengetahuan: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html>

Nordiawan, D. (2006:5). *Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Retrieved from BPKAD.banjarkab.go.id: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/>

Winarto. (2007:9). *Definis Sistem Akuntansi Menurut Ahli*. Retrieved from Kumpulan Pengertian: <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/03/pengertian-sistem-akuntansi-menurut.html>